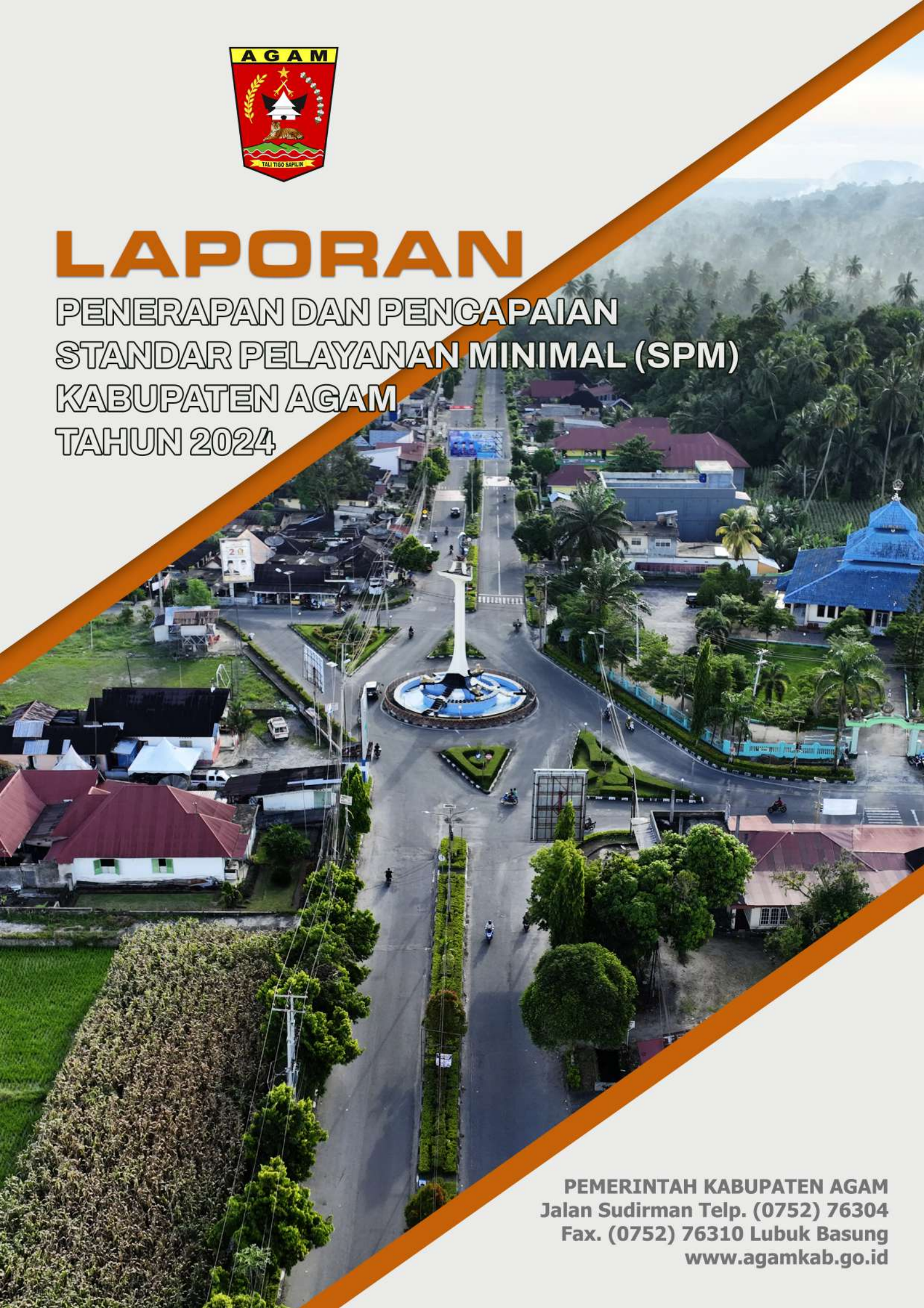
LAPORAN

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN AGAM TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
Jalan Sudirman Telp. (0752) 76304
Fax. (0752) 76310 Lubuk Basung
www.agamkab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Alloh SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 di Kabupaten Agam dapat terselesaikan pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, serta berdasarkan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah..

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Harapan kami, dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Pada akhirnya, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Lubuk Basung, 27 Februari 2025

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG ……..	1
	B. DASAR HUKUM ……	2
	C. KEBIJAKAN UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN …….	3
BAB II	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	12
	A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN……	12
	B. BIDANG URUSAN KESEHATAN ……	27
	C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM …….....	46
	D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT……	54
	E. BIDANG URUSAN SOSIAL…….....	62
	F. BIDANG URUSAN TRATIBUM LINMAS ……..	76
BAB III	PROGRAM DAN KEGIATAN	94
	A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN……....	94
	B. BIDANG URUSAN KESEHATAN……..	106
	C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM……..	112
	D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT……....	115
	E. BIDANG URUSAN SOSIAL …….....	116
	F. BIDANG URUSAN TRANTIBUM LINMAS ……	143
BAB IV	PENUTUP	156

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026 4

1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2026 5

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 6

1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026.....7

1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021-2026.....7

1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2021-202.....9

2.1 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024.....13

2.2 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 19

2.3 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 24

2.4 Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025..... 25

2.5 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 31

2.6 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Agam Tahun 2024..... 40

2.7 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Agam Tahun 2024 43

2.8 Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 43
2.9 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 47
2.10 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 50
2.11 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024..... 50
2.12 Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 51
2.13 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 55
2.14 Alokasi Anggaran Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024..... 57
2.15 Personil Pendukung Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 58
2.16 Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 59
2.17 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 63
2.18 Alokasi Anggaran Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 68
2.19 Personil Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 71
2.20 Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 72
2.21 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2023 77
2.22 Alokasi Anggaran Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024 81
2.23 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024..... 87

2.24 Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024 88
3.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 94
3.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 106
3.3 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 112
3.4 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 115
3.5 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 117
3.6 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024 145

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan berdasarkan prioritas yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka dalam penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintah daerah wajib memperhatikan prioritas program/kegiatan yang mengakomodir penerapan SPM dengan prinsip sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Agam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan

pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Memprioritaskan penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana, serta faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu mensiasati penerapan SPM supaya pelayanan dasar yang minimal harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tetap terpenuhi.

B. DASAR HUKUM

Regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebekaran Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam merumuskan strategi pembangunan daerah memprioritaskan optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang indikatornya termaut dalam SPM. Rencana penerapan dan pencapaian SPM disinergikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Sasaran capaian SPM yang mendukung aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah menjadi tolok ukur rencana pembangunan yang termuat dalam RPJMD, RKPD, Resntra OPD dan diakomodir dalam renja OPD serta diterjemahkan secara operasional dalam program/kegiatan.

Penerapan SPM tahun 2024s, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta regulasi dari kementerian teknis masing-masing urusan, mengatur jenis dan mutu pelayan dasar yang mengamanatkan capaian terhadap indikator kinerja utama Pemerintahan Daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam merumuskan kebijakan yang memuat strategi-strategi untuk pencapaian indikator SPM yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas.

Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yang termuat pada Misi ke-3 "**Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan", keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana."**, Misi ke-4 yakni "**Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter"** dan Misi ke-5 yakni "**Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK".** Kemudian diterapkan melalui Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui Renstra OPD pelaksana SPM Tahun 2021-2026 seperti termuat dalam tabel berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 1.1
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani			
Misi ke-4 :Membangun Masyarakat Yang Mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter			
No	Bidang Urusan	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pendidikan	Penyediaan Perlengkapan Dasar siswa	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin PAUD usia 5-6 Tahun 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin usia SD 7-12 Tahun 3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin SMP usia 13-15 Tahun 4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin Kesetaraan usia 7-18
		Peningkatan Kualifikasi dan sertifikasi Pendidik	1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik.
		Penguatan dan Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	1. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan Melaksanakan gerakan Literasi sekolah madani yang terprogram 2. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas metode pembelajaran 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Satuan Pendidikan. 5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 6. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan

			kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan Melaksanakan gerakan Literasi sekolah madani yang terprogram 7. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas sarana prasarana 8. Peningkatan kualitas metode pembelajaran 9. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Satuan Pendidikan. 10. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kab.Agam Tahun 2021-2026

2. Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 1.2
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani			
Misi ke-4 : Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter			
No	Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan Kesehatan balita Pelayanan Kesehatan anak sekolah Pelayanan kesehatan usia	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular,peningkatan penanggulangan gawat darurat
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar	Pengembangan lingkungan sehat, meningkatkan kerjasama dan koordinir dalam pengelolaan limbah B3

	produktif 15-59 tahun 7. Pelayanan kesehatan lansia 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB 12. Pelayanan kesehatan orang yang beresiko HIV/AIDS	Meningkatkan Faskes kesehatan terstandarisasi	Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
		Meningkatkan sistem pelaporan terpadu	Meningkatkan ketersedian penggunaan aplikasi pelayanan kesehatan
		Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan terstandarisasi	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan pengelolaan tenaga kesehatan
		Meningkatnya mutu kefarmasian dan makanan minuman	Peningkatan pengelolaan kefarmasian, pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya
		Meningkatkan penerapan pola hidup sehat	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan cakupan PHBS tatanan rumah tangga

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2021-2026

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.3
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani			
Misi ke-2 : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan migitasi bencana			
No	Jenis Pelayanan Dasar	Stategi	Arah Kebijakan
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Meningkatkan penyediaan sarana air minum	Memperluas cakupan masyarakat dengan akses air minum layak konsumsi
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Meningkatkan penyediaan sanitasi permukiman	Memperluas cakupan masyarakat dengan akses sanitasi layak

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2021-2026

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 1.4
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani			
Misi ke-2 : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan migitasi bencana			
No	Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Melakukan percepatan pelaksanaan pendataan bagi Rumah yang terkena Relokasi Korban Bencana	Menyediakan Data Rumah terkena Relokasi Bencana
		Melakukan percepatan pelaksanaan Rehabilitasi/Pembangunan bagi Rumah yang terkena Relokasi Korban Bencana	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah	Memperluas akses terhadap tempat Tinggal dan Permukiman yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat yang terdampak relokasi Program Pemerintah.	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat terdampak relokasi secara proporsional dan berimbang.

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2021-2026

5. Bidang Urusan Sosial

Tabel 1.5
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani			
Misi ke-4 : Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter			
No	Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang	1. Peningkatan akses pelayanan terhadap	1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan

	disabilitas terlantar diluar panti	disabilitas terlantar diluar panti di luar Panti 2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi disabilitas terlantar diluar panti di luar Panti dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Peningkatan dan pengawasan dan perlindungan sosial terhadap disabilitas terlantar diluar panti di luar Panti	bagi penyandang disabilitas terlantar 2. Memberikan pelayanan sosial untuk perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 3. Penyaluran penyandang disabilitas ke panti sosial Tuna Grahita dan Tuna Netra
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar Panti	1. Peningkatan akses pelayanan terhadap Anak terlantar di luar Panti 2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi anak terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Peningkatan dan pengawasan dan perlindungan sosial terhadap anak terlantar	1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan bagi anak terlantar 2. Memberikan pelayanan sosial untuk perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi anak terlantar
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	1. Peningkatan akses pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di luar Panti 2. Perluasan dan pemerata an pemberian bantuan bagi lanjut usia terlantar di luar Panti dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Peningkatan dan pengawas an dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar di luar Panti	1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan bagi lanjut usia terlantar 2. Memberikan pelayanan sosial untuk perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 3. Penyaluran Lansia terlantar ke panti sosial lanjut usia

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis di luar panti 2. Peningkatan pengawasan dan perlindungan sosial bagi gepeng	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana bagi korban bencana	Peningkatan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 2. Memberikan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam satu tahun anggaran

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab.Agam Tahun 2021-2026

6. Bidang Urusan Trantibum Linmas

Tabel 1.6
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibumlimas Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam Yang Mandiri, Berprestasi Dan Madani			
Misi ke-5 : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK			
No	Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Optimalisasi kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas	1. Pemenuhan biaya operasional Satpol PP Damkar 2. Penerapan SOP dalam pelaksanaan tugas 3. Penerapan sistem piket 24 jam bagi petugas operasional lapangan
		Peningkatan upaya pre-emtiv dan preventif dalam mencegah gangguan trantibum	1. Peningkatan kualitas patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan pengawasan penggunakan Alat Proteksi pada Badan Usaha dan Instansi

			3. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
		Peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis Satpol PP Damkar	1. Membangun kerjasama dengan lembaga/instasi penyelenggara diklat teknis Satpol PP Damkar 2. Mengirimkan peserta pelatihan secara selektif sesuai kebutuhan
		Membangun sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, TNI, Polri dan Kejaksaan dalam Penegakan Perda serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Melaksanakan pelatihan terhadap Anggota Linmas
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana	Menyediakan dan memasang rambu evakuasi dan papan informasi publik
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan upaya Pre-emtiv dan preventiv dalam penanggulangan bencana	1. Peningkatan pengawasan penggunakan Alat Proteksi pada Badan Usaha dan Instansi 2. Melaksanakan penambahan sarana dan prasarana Kantor serta peralatan operasional secara bertahap
		Peningkatan respon masyarakat terhadap kejadian bencana	1. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2. Menyususn Perbub SOP dan Perda RPB
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana	1. Peningkatan peran TRC dalam penanggulangan bencana TRC 2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, serta TNI, Polri 3. Melakukan pembinaan terhadap Forum PRB,KSB serta Pusdalops
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan standar teknis pelayanan kebakaran	Membangun kerjasama dengan Dinas Kebakaran kabupaten/Kota dalam penanggulangan kebakaran

		Optimalisasi fungsi Satlinmas dan Satlakar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	1. Membentuk dan membina Satlakar ditingkat Nagari 2. Pemenuhan sarana dan prasarana Satlakar secara bertahap

Sumber : Renstra Satpol PP & Damkar dan BPBD Kab.Agam Tahun 2021-2026

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Agam yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaannya, penerapan SPM di bidang Urusan Pendidikan diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis pelayanan Minimal Pendidikan, adapun jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan terdiri dari:

a. Pendidikan Dasar.

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

b. Pendidikan Kesetaraan.

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

c. Pendidikan Anak Usia Dini.

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Target, Realisasi dan Capaian SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM di Bidang urusan Pendidikan, diuraikan dalam target, realisasi dan capaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1		**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Orang**	**16.660 orang**	**16.631 Orang**	**99,83%**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Angka Partisipasi Sekolah	%	90.69	90.69	100	
	2	Angka Partisipasi Murni	%	65.71	65.71	100	
	3	Peningkata proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	%	52.31	56.25	100	
	4	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV)	%	66.84	72.6	100	
	5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5.87	5.87	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	6	Kecukupan formasi Guru ASN	%	1	1	100	
	7	Indeks distribusi Guru	%	0.79	0.33	41.77	
	8	Proporsi PTK bersertifikat	%	42.6	41.6	97.65	
	9	Proporsi PTK Penggerak	%	2.04	2.04	100	
2		**Pendidikan Dasar**	**Orang**	**81.986 Orang**	**81859 Orang**	**99.85**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
SD							
	1	Angka partisipasi Kasar	%	97.19	97.19	100	
	2	Angkar partisipasi sekolah	%	100	97.19	97.19	
	3	Kemampuan literasi	Nilai	62.06	79.87	100	
	4	Kemampuan numerasi	Nilai	45.71	71	100	
	5	Perbedaam skor literasi	Nilai	2.93	6.94	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.3	14.55	100	
	7	Indeks Iklim keamanan	Nilai	79.02	75.96	96.13	
	8	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	75.78	74.51	98,32	
	9	Indeks Iklim inklusivitas	Nilai	75.78	58.71	77.47	
	10	Kecukupan formasi Guru ASN	%	22.5	49.32	100	
	11	Indeks distribusi Guru	%	0.4	0.38	95	
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	89.3	89.3	100	
	13	Proporsi PTK penggerak	%	0.05	0.05	100	
	SMP						
	1	Angka partisipasi kasar	%	100.66	101.56	100	
	2	Angka partsipasi sekolah	%	100	101.56	100	
	3	Kemampuan literasi	Nilai	70.85	71.31	100	
	4	Kemampuan numerasi	Nilai	66.99	63.85	95.31	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.39	3.55	100	
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.16	18.85	100	
	7	Indeks iklim keamanan	Nilai	72.7	68.25	93.88	
	8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.79	70.79	100	
	9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.9	55.78	91.59	
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	25.5	49.46	100	
	11	Indesk distribusi Guru	%	0.37	0.33	89.19	
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	86.1	86.1	100	
	13	Proporsi PTK penggerak	%	0.07	0.07	100	
3		**Pendidikan Kesetaraan**	**Orang**	**2746 Orang**	**2746 Orang**	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Angka partisipasi kasar	%	2.54	2.54	100	
	2	Angka partsipasi sekolah	%	100	100	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	3	Kemampuan literasi	Nilai	52.04	63.04	100	
	4	Kemampuan numerasi	Nilai	48.34	51.34	100	
	5	Perbedaan skor literasi	Nilai	4.07	8.44	100	
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.89	6.22	100	
	7	Indeks iklim keamanan	Nilai	64.74	64.22	99.20	
	8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63.54	57.57	90.60	
	9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63.54	51.27	80.69	
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	(Na) 1	Na) 1	100	
	11	Indesk distribusi Guru	%	Na) 1	Na) 1	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	Na) 1	Na) 1	100	
	13	Proporsi PTK penggerak	%	0.05	0.05	100	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam Tahun 2024

3. Alokasi Anggaran

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan anggaran yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
(1)	**Pendidikan Dasar**						
1.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				61.938.574.141	58.873.577.168	95.05
		1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	981.590.400	980.512.000	99.89
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Unit	2.619.624.961	2.599.889.067	99.25

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
		3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	2.129.959.471	2.059.894.300	96.71
		4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	328.445.692	300.087.364	91.37
		5	Penhyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.351.500.000	1.344.129.000	99.45
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	350.999.950	305.151.356	86.94
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik	109.365.000	94.857.310	86.73
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidik	50.480.533.885	47.622.051.962	94.34
		9	Pembangunan Ruang Kelas	Ruang	2.777.841882	2.763.912.317	99.50
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	50.000.000	49.451.470	98.90
		11	Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik	50.000.000	48.575.230	97.15

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	708.712.900	705.065.792	99.49
2.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				24.035.549.792	22.429.592.413	99.32
		1	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4.178.078.386	4.129.422.595	98.84
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	131.250.000	130.902.794	99.74
		3	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	484.477.260	0	0
		4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	348.777.650	344.141.250	98.67
		5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	433.000.000	358.411.850	82.77
		6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	421.700.000	393.064.500	93.21
		7	Pengembangan Karir Pendidik	Orang	110.323.260	85.816.097	77.79

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
			dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	350.000.000	303.999.610	86.86
		9	Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	17.572.943.236	16.680.843.717	94.92
		10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	5.000.000	2.990.000	59.80
3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**8.680.292.880**	**8.540.213.818**	**98.39**
		1	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	437.280.958	426.288.859	97.49
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	639.071.000	628.414.468	98.33
		3	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	30.000.000	21.855.700	72.85
		4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	549.228.750	534.358.800	97.29

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	57.999.400	25.752.000	44.40
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidik	79.999.090	65.280.650	81.60
		7	Penglolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidik	5.902.200.000	5.886.898.372	99.74
4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**				**5.833.830.486**	**4.848.592.927**	**83.11**
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	1.110.368.443	1.097.999.183	98.89
		2	Pengadaan Alat Praktikdan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Paket	41.149.700	37.591.400	91.35
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.336.599.544	368.874.700	27.60
		4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Satuan Pendidikan	3.251.900.000	3.251.900.000	100

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
			Nonformal/Kesetaraan				
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	8.850.000	8.660.000	97.85
		6	Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	25.000.000	23.750.308	95
		7	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	44.958.799	44.869.840	99.80
		8	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasaran dan Utilitas Sekolah	Unit	15.004.000	14.947.496	99.62

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam Tahun 2024

4. Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan faktor penting dalam pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di daerah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)												Total
		PNS				Non PNS				PPPK				
1	Tenaga Pendidik	PAUD	SD/MI	SMP/MTs	PKBM	PAUD	SD/MI	SMP/MTs	PKBM	PAUD	SD/MI	SMP/MTs	PKBM	
a.	Guru	152	2198	983	6	986	907	1386	113	2	1494	515	8	8750

	b.	Pengawas	2	21	2												25
	c.	Penilik	13				0				0						13
	d.	Pamong	3				0				0						4
2		Tenaga Kependidikan	186				1166				0						1352

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan tahun 2024 di Kabupaten Agam tentu mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, berikut permasalahan dan solusi per tahap penerapan SPM yang ditemukan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)		Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan Dasar	1	Pengumpulan Data		Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan karena data peserta didik yang kurang mampu perlu pengolahan terlebih dahulu	Membuat tim khusus untuk mengumpulkan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar		Perhitungan kebutuhan saat ini hanya berdasarkan angka minimum yang harus dicapai di Rapor Pendidikan. Diperlukan juga data	koordinasi yang intens seluruh Elemen

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)		Permasalahan	Solusi
					dari bidang yang bersangkutan	
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar		Belum Maksimal disebabkan karena pertimbangan anggaran Pemerintah Daerah sehingga dalam penyusunan rencana anggaran mempertimbangkan mandatori dan kebutuhan wajib daerah	-
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar		Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh siswa miskin karena keterbatasan anggaran	Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	1	Pengumpulan Data		Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan karena data peserta didik yang kurang mampu perlu pengolahan terlebih dahulu	Membuat tim khusus untuk mengumpulkan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar		Perhitungan kebutuhan saat ini hanya berdasarkan angka minimum yang harus dicapai di Rapor Pendidikan. Diperlukan juga data dari bidang yang bersangkutan	koordinasi yang intens seluruh Elemen

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)		Permasalahan	Solusi
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar		Belum Maksimal disebabkan karena pertimbangan anggaran Pemerintah Daerah sehingga dalam penyusunan rencana anggaran mempertimbangkan mandatori dan kebutuhan wajib daerah	Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar		Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh siswa miskin karena keterbatasan anggaran	Monitoring dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
3	Lainnya				Masih adanya data yang belum tersedia untuk pemenuhan laporan SPM	Melengkapi indikator-indikator yang ada dalam Rapor Pendidikan sesuai dengan indikator SPM

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Tahun 2024

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengacu pada definisi operasional masing-masing pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun jenis pelayanan dasar yang berkaitan dengan pelayanan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil memiliki standar kuantitas kunjungan 4 kali selama hamil; 1 kali pada trimester pertama, 1kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Standar kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan ante natal 10 T yang terdiri dari:

- Pengukuran berat badan.
- Pengukuran tekanan darah.
- Pengukuran LILA.
- Pengukuran tinggi puncak Rahim.
- Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin.
- Pemberian imunisasi sesuai status imunisasi.
- Tablet tambah darah.
- Tes laboratorium/tripel eliminasi.
- Tata laksana/penanganan kasus.
- Temu wicara(konseling).

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Standar persalinan sesuaia standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal(APN) sesuai standar dilakukan di fasilitas kesehatan

dan tenaga penolong minimal 2 orang,terdiri dari Dokter dan bidan atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas KN1: 6-48 jam pasca kelahiran, KN2: 3-7 hari pasca kelahiran, .KN 3: 8-28 hari pasca kelahiran dan standar kualitas.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sakit dan pelayanan balita sehat. Pelayanan kesehatan balita terdiri dari pelayanan kesehatan balita 0-11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan dan pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan 1 kali dalam 1 tahun ajaran anak kelas 1-9 dan anak usia 7-15 tahun diluar sekolah.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usiaproduktif meliputi kegiatan skrining, minimal 1 kali setahun meliputi:

- Pengukuran berat badan,tinggi badan,lingkar perut
- Pengukuran tekanan darah
- Pemeriksaan gula darah
- Pemeriksaan SADANIS dan IVA Tes untuk wanita usia 30-50 tahun.
- Anamnesa perilaku berisiko
- Tindak lanjut hasil skrining: rujukan jika perlu dan penyuluhan

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usialanjut sesuai standar meliputi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi kegiatan:

- Pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan di fasyankes.Tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambah pelayanan terapi farmakologi.
- Edukasi perubahangayahidup dan atau kepatuhan minum obat.
- Melakukan rujukan bila diperlukan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus meliputi kegiatan:

- Pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan di fasyankes.Tes gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200mg/dl ditambah pelayanan terapi farmakologi.
- Edukasi perubahan gayahidup dan atau nutrisi.
- Melakukan rujukan bila diperlukan.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pelayanan kesehatan ODGJ Berat sesuai standar penderita bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

- Pemeriksaan kesehatan jiwa
- Edukasi
- Terapi farmakologi

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar meliputi:

- Pemeriksaan klinis
- Pemeriksaan penunjang
- Edukasi

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi HIV sesuai standar meliputi:

- Edukasi perilaku berisiko
- Skrining

2. Target, Realisasi dan Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa dalam pencapaian penerapan SPM diiringi dengan capaian mutu pelayanan dasar. Target, realisasi dan capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.		**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	3856	3856	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Vaksin Tetafus Difteri (Td)	Vaksin	3856	3856	100	
	2.	Tablet tambahan darah	Tablet	3856	3856	100	
	3	Alat deteksi resiko ibu hamil : Tes Kehamilan	Orang	3856	3856	100	
	4.	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3856	3856	100	
	5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3856	3856	100	
	6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin **(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)**	Paket	3856	3856	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	23	23	100	
	8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3856	3856	100	
	9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3856	3856	100	
	10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	100	
	11	Gel USG	Botol	23	23	100	
	12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	251	251	100	
	13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	14	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	494	100	
	15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	101	101	100	
	16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	46	100	
	17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	3856	3856	100	
2.		**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	3808	3808	**100**	
	1	Formulir Photograf	Formulir	3808	3808	100	
	2	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	Paket	3808	3808	100	
	3	Buku KIA	Buku	3808	3808	100	
	4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	100	
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	251	251	100	
	6	Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	494	494	100	
	7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	101	101	100	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	46	100	
3.		**Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir**	**Orang**	3661	3661	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3661	3661	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	3661	3661	100	
	3	Salep/Tetes mata antibiotic	Orang	3661	3661	100	
	4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	3661	3661	100	
	5	Formulir MTBM	Formulir	3661	3661	100	
	6	Buku KIA	Buku	3661	3661	100	
	7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	100	
	8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	219	219	100	
	9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	494	100	
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	101	101	100	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	46	46	100	
	13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	46	100	
	14	Kader Kesehatan	Orang	4026	4026	100	
4.		**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Orang**	16504	16504	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	Dokumen	16504	16504	100	
	2	Formulir DDTK	Formulir	16504	16504	100	
	3	Buku KIA	Orang	16504	16504	100	
	4	Vitamin A Biru	Kapsul	6288	6288	100	
	5	Vitamin A Merah	Kapsul	15144	15144	100	
	6	Vaksin Imunisasi Dasar : BCG	Vaksin	3880	3880	100	
	7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3880	5436	100	
	8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	3880	3880	100	
	9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	3880	3880	100	
	10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	Vaksin	3880	3880	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	3880	3880	100	
	12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	Vaksin	3880	3880	100	
	13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	3880	4655	100	
	14	Peralatan Anafilaktik	Paket	869	869	100	
	15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1	1	100	
	16	Tenaga medis : Dokter	Orang	217	217	100	
	17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	494	100	
	18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	46	100	
	20	Guru PAUD	Orang	3663	3663	100	
	21	Kader Kesehatan	Orang	4026	4026	100	
5.		**Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	38241	38241	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Buku raport kesehatanku	Buku	38241	38241	100	
	2.	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	38241	38241	100	
	3.	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	38241	38241	100	
	4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	38241	38241	100	
	5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	38241	38241	100	
	6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	247	247	100	
	7.	Alat Pemeriksaan Hb	Alat	23	23	100	
	8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	23	23	100	
	9.	Media promosi kesehatan	Paket	23	23	100	
	10.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	38241	38241	100	
	11.	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	311	311	100	
	12.	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	494	100	
	13.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	14.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	46	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	101	101	100	
	16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	46	100	
	17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3663	3663	100	
	18.	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	4026	4026	100	
6.		**Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**Orang**	158035	158035	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	*23*		
	2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	46	*46*		
	3	Alat : Tensimeter	Unit	92	*92*		
	4	Alat : Glukometer	Unit	46	*46*		
	5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	23	*23*		
	6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	46	*46*		
	7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	23	23		
	8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	23	23		
	9	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	23	23		
	10	Kuesioner PUMA	Dokumen	23	23		
	11	Alat Pelayanan KB	Unit	69	*69*		
	12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23	*23*		
	13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	78782	*78782*		
	14	Tenaga medis : Dokter	Orang	217	*217*		

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	*494*		
	16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	*358*		
	17	enaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	*46*		
	18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	*46*		
	19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4026	*4026*		
7.		**Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**	**Orang**	30918	*30918*	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	23	23	100	
	2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	23	23	100	
	3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	23	23	100	
	4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	30918	30918	100	
	5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	30918	30918	100	
	6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	30918	30918	100	
	7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	100	
	8	Tenaga medis : Dokter	Orang	217	217	100	
	9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	494	100	
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	11	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	46	46	100	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	46	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4026	4026	100	
8.		**Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi**	**Orang**	*7905*	*7905*	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Paket	23	23	100	
	2	Obat Hipertensi	Paket	7905	7905	100	
	3	Tensimeter	Unit	92	92	100	
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	23	23	100	
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	100	
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	217	217	100	
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	494	494	100	
	8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	46	46	100	
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	46	46	100	
	11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	101	101	100	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	46	100	
9.		**Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	*2124*	*2124*	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Obat Diabetes Melitus	Paket	*2124*	*2124*	100	
	2	Fotometer atau Glukometer	Unit	*23*	*23*	100	
	3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	*23*	*23*	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	*23*	*23*	100	
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	*23*	*23*	100	
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	*217*	*217*	100	
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	*494*	*494*	100	
	8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	*358*	*358*	100	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	*101*	*101*	100	
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	*46*	*46*	100	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	*46*	*46*	100	
	12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	*45*	*45*	100	
10.		**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**Orang**	*716*	*716*	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Buku pedoman diagnosis penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	23	23	100	
	2	Penyediaan Psikofarmaka	Jenus	23	23	100	
	3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	23	23	100	
	4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	23	23	100	
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	23	23	100	
	6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	217	217	100	
	7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	23	23	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	23	23	100	
	9	Tenaga profesional lainnya	Orang	23	23	100	
11.		**Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkolosis**	**Orang**	*2864*	*2864*	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	100	
	2	Reagen Zn TB	Kit	2864	2864	100	
	3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	2864	2864	100	
	4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	2864	2864	100	
	5	Catridge Tes Cepat Molekuler	Test	2864	2864	100	
	6	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Dokumen	23	23	100	
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	23	23	100	
	8	Tuberkulin	Vial	23	23	100	
	9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	221	221	100	
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	358	358	100	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	101	101	100	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	46	100	
	13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	45	45	100	
	14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	12	12	100	
	15	Kader Kesehatan	Orang	4026	4026	100	
12.		**Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency)**	**Orang**	*1853*	*1853*	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, Poster, banner	Paket	23	23	100	
	2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Test	*1853*	*1853*	100	
	3	Bahan Medis Habis pakai, Handschoen Alkohol swab Plester Lancet/jarum steril Jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai	Paket	*1853*	*1853*	100	
	4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	*1853*	*1853*	100	
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	*221*	*221*	100	
	6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	*494*	*494*	100	
	7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	*358*	*358*	100	
	8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	*45*	*45*	100	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	*46*	*46*	100	
	10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	*96*	*96*	100	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2024

3. Alokasi Anggaran

Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Bidang Urusan Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Alokasi anggaran tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam rangka pencapaian target Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Agam berjumlah Rp.1.659.618.800,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan	Ket
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	175.805.000	161.502.200	91.86	
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	45.825.000	26.533.000	57.90	
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000	200.000	100	
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4.000.000	4.000.000	90.60	
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah	769.634.800	721.550.000	93.75	
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	11.900.000	11.900.000	100	

	pada Usia Produktif		pada Usia Produktif				
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	14.000.000	14.000.000	100	
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	0	0	0	
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	128.363.000	128.363.000	99.99	
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	0	0	0	
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	487.941.000	165.500.000	94.50	
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	21.950.000	13.500.000	61.50	

	Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV				
JUMLAH TOTAL				**1.659.618.800**	**1.245.033.800**	**75.02**	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2024

4. Dukungan Personil

Penerapan SPM di Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dengan dukungan personil tenaga medis yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Dukungan Personil Pencapaian dan Penerapan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)		Total
		PNS	Non PNS	
1	Dokter Umum/Kandungan	79	41	120
2	Dokter Gigi	37	11	48
3	Perawat	273	63	336
4	Bidan	418	45	463
5	Nutrisionis	41	5	46
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	12	46

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Ada Beberapa Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai. Berikut disampaikan permasalahan dan upaya/solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 :

Tabel 2.8
Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. **2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar** Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenagan wajib daerah yang harus dituntaskan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name da n by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. **2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar** Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenagan wajib daerah yang harus dituntaskan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.. **2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar** Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenagan wajib daerah yang harus dituntaskan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**1. Pengumpulan Data** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	**1. Pelaksanaan** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**1. Pelaksanaan** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	**1. Pelaksanaan** Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Agar Daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini karena SPM merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dituntaskan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2024

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang ditentukan oleh peraturan kementerian teknis Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun2023 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan jenis pelayanan dasar antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target, Realisasi dan Capaian SPM

Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan target, realisasi dan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.		**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	322	322	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
JARINGAN PERPIPAAN							
	1.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per	Rumah Tangga	71	71	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM					
	2.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1	1	100	
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN							
	3.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1	1	100	
	4.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa,	Rumah Tangga	1	1	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		tidak berbusa, tidak berbau					
2.		**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Orang**	478	478	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1	1	100	
	2.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	125	125	100	
	3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per	Rumah Tangga	139	139	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2024

3. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang penerapan indikator SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp. Rp 2.160.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.693.190.351,- dengan capaian sebesar 94.96%.

Tabel 2.10
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Ket
1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	730.000.000	693.190.351	94.96	
2	**Program Pengelolaan dan Oengembangan Air Limbah**	1	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	150.000.000	133.495.830	89.00	
		2	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.280.000.000	1.217.646.896	95.13	

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Ket
			Terpusat Skala Perkotaan				
Total				**2.160.000.000**	**2.044.333.077**	**94.65**	

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2024

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam pengelolaan pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Kategori/Status Personil	Jumlah
1	PNS	8 Orang
3	Non PNS	4 Orang
Total		12 Orang

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, ada beberapa persoalan/permasalahan serta solusi dalam pelaksanaannya, antara lain:

Tabel 2.12
Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1	Pengumpulan Data	1	Masih kurangnya data-data yang mendukung SPM air minum	Melakukan pendataan dalam rangka melengkapi data yang diminta
				2	Peningkatan kapasitas dan jumlah personil dalam pengumpulan data	Perlunya penambahan dan pengembangan kapasitas personil SKPD pelaksana SPM dalam pengumpulan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Kurangnya pemahanan SPM dan penetapan target yang kurang tepat	Penetapan target sesuai dengan karakteristik daerah
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Alokasi anggaran yang masih kurang dalam pelaksanaan program air minum	Perlunya kebijakan dan keberpihakan dalam mengalokasikan anggaran untuk program air minum

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pembinaan SPM dari Kementerian yang belum rutin dan kontinu	Pemerintah pusat aktif dan kontinu melakukan sosialisasi kepada daerah untuk peningkatan pemahaman SPM
				2	Tumpang tindih peraturan dan kebijakan tentang SPM dan indikator SPM	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar Kementrian
				3	Kurangnya sumber mata air yang memenuhi standar	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan sosialisasi penerapan sanitasi aman agar menghindari mata air tanah tercemar oleh limbah domestic
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	1	Pengumpulan Data	1	Masih kurangnya data-data yang mendukung SPM air limbah domestic	Melakukan pendataan dalam rangka melengkapi data yang diminta
				2	Peningkatan kapasitas dan jumlah personil dalam pengumpulan data	Perlunya penambahan dan pengembangan kapasitas personil SKPD pelaksana SPM dalam

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
						pengumpulan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Kurangnya pemahanan SPM dan penetapan target yang kurang tepat	Penetapan target sesuai dengan karakteristik daerah
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Alokasi anggaran yang masih kurang dalam pelaksanaan program air limbah domestic	Perlunya kebijakan dan keberpihakan dalam mengalokasikan anggaran untuk program air limbah domestik
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pembinaan SPM dari Kementrian yang belum rutin dan kontinu	Pemerintah pusat aktif dan kontinu melakukan sosialisasi kepada daerah untuk peningkatan pemahaman SPM
				2	Tumpang tindih peraturan dan kebijakan tentang SPM dan indikator SPM	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar Kementerian

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
				3	Saat ini IPLT belum beroperasi di Kabupaten Agam, dalam proses penetapan perda dan retribusi	Penyusunan perda air limbah domestik serta retribusi IPLT

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2024

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan dua jenis pelayanan dasar antara lain:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah

2. Target, Realisasi dan Capaian SPM

Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat dengan target, realisasi dan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.		**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana**	**Orang**	**0**	**0**	**0**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana		1	1	100	Mutu Pelayanan diisi sesuai dengan Form Penerapan
	2.	Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana		1	1	100	
	3.	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/Relokasi bagi bencana		1	1	100	
	4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		1	1	100	
2.		**Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah**	Orang	1	1	100%	
	1.	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah	Rumah	1	1	100%	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		dan/Atau Bangunan					
		a. Penilaian Oleh Tim Penaksir (Appraisal)	Rumah	1	1	100%	
		b. Proses Sosialisasi kepada masyarakat, dan	Rumah	0	0	100%	
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam rencana aksi	Rumah	0	0	100%	
	2.	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	100%	

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman 2024

3. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Agam, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab.Agam Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
I	**Program Pembangunan Rumah**				126.853.800	28.816.450	22.72

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
		1.	Pendataan Penyediaan dan Tehanilitasi Rumah Korban Bencana Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			1.	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	40.948.800	22.913950	55.96
			2.	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	85.905.000	5.902.500	6.87
		2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		0	0	0

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2024

Untuk capaian pembangunan kembali rumah korban bencana, dilaksanakan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana daerah. Subkegiatan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat terletak pada subkegiatan yang sama.

4. Dukungan Personil

Dalam pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman didukung oleh personil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Agam, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.15
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024

No	Kategori/Status Personil	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang Perumahan	1
4	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1
5	Fungsional Analis Kebijakan	1
6	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1
7	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	1
8	Analis Perencanaan	1
9	Staf Administrasi	1
Total		9

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab.Agam Tahun 2024 tentunya mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain :

Tabel 2.16
Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
1	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana**	1	Pengumpulan Data	1	Pada Kegiatan TA 2024, Metode Pengumpulan Data masih dilakukan secara manual. Untuk itu, untuk keberlanjutan kegiatan Pendataan Rumah Warga di Lokasi Rawan Bencana TA 2024dilakukan dengan metode berbasis aplikasi digital	Untuk Kegiatan Pendataan Rumah Warga di Lokasi Rawan Bencana pada TA 2024 dilakukan dengan metode berbasis aplikasi digital
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan Kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar dilakukan masih dengan cara perkejadian bencana alam	ntuk kedepanya perlu dilakukan pendataan perumahan dan kajian bencana menyeluruh yang akan mengancan masing-masing kecamatan di Kabupaten Agam supaya

						pemenuhan penanganan SPM Perumaharan Rakyat terlaksana.
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Pemenuhan SPM untuk TA 2024, hanya terakomodir untuk Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Sehingga untuk Kegiatan pemenuhan SPM lainnya yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota belum dilaksanakan untuk TA 2024	Untuk Tahun Anggaran berikutnya, diharapkan penambahan anggaran untuk kegiatan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayana dasar	1	Pembangunan dan Rebabilitasih Rumah Masyarakat Akibat bencana, Relokasi Rumah Masyarakat akibat bencana,	dilaksanakan penanganannya dengan dana BTT, DSP (APBD dan APBN) dan sumber dana lainya yang tidak mengikat.

					belum terlaksana untuk Tahun Anggaran 2024	
2	**Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah**	1	Pengumpulan Data	Tidak Menganggarkan Kegiatan		
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar			
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar			
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar			

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2024

E. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan jenis pelayanan dasar antara lain :

a. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar Panti
b. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti
c. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana

2. Target, Realisasi dan Capaian SPM

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan target dan capaian pada tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.17
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti**	**Orang**	80 Orang	80 Orang	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	400	402	100	
	2.	Penyediaan permakanan	Orang	46	46	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	28	28	100	
	4.	Penyediaan sandang	Orang	4	4	100	
	5.	Penyediaan alat bantu	Orang	2	15	100	
	6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	100	
	7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	80	80	100	
	8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	100	129	100	
	9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	5	100	
	10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	4	100	
	11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	6	6	100	
	12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	100	
	13.	Layanan rujukan	Orang	6	5	100	
2.		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**	**Orang**	**40**	**40**	**100**	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	1200	1200	100	
	2.	Penyediaan Permakanan	Orang	14	14	100	
	3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	14	15	100	
	4.	Penyediaan sandang	Orang	2	2	100	
	5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	100	
	6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	100	
	7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	49	100	
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	49	100	
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	2	100	
	10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	3	100	
	11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	100	
	12.	Layanan rujukan	Orang	3	8	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
3.		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti**	Orang	**78**	**78**	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	400	409	100	
	2.	Penyediaan permakanan	Orang	59	59	100	
	3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	28	28	100	
	4.	Penyediaan sandang	Orang	6	6	100	
	5.	Penyediaan alat bantu	Orang	1	2	100	
	6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	100	
	7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	78	78	100	
	8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	75	80	100	
	9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	100	
	10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	100	
	11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti	Orang	6	6	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		keberadaan keluarga					
	12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	100	
	13.	Layanan rujukan	Orang	6	6	100	
4.		**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Orang**				
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	1	2	100	
	2.	Penyediaan Permakanan	Orang	1	1	100	
	3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	100	
	4.	Penyediaan sandang	Orang	1	1	100	
	5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	100	
	6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	2	100	
	7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	1	1	100	
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/	Orang	1	1	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Bukti kepemilikan NIK					
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	2	100	
	10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	2	100	
	11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	100	
	12.	Layanan rujukan	Orang	1	1	100	
5.		**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	**300**	**407**	**100**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Penyediaan permakanan	Orang	300	407	100	
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	300	407	100	
	3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	42	55	100	
	4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5	5	100	
	5.	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	300	407	100	

Sumber : Data Dinas Sosial Kab.Agam Tahun 2024

3. Alokasi Anggaran

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial sebesar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dengan rincian anggaran yang tersebar dalam subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Ket
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**275.488.800**	**176.617.590**	**64.11**	
		1	Penyediaan Permakanan	55.423.500	1.714.000	3.09	
		2	Penyediaan Sandang	3.600.000	892.000	24.78	
		3	Penyediaan Alat Bantu	758.200	0	0	
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.814.800	753.000	41.49	
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	33.923.100	29.800.000	87.85	
		6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	72.800.000	68.646.400	94.29	

			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng				
		7	Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	803.900	0	0	
		8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,933,000	7,933,000	100	
		9	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	16.870.000	14.920.000	88.44	
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.004.300	350.000	34.85	
		11	Pemberian Layanan Rujukan	56.705.000	38.872.190	68.55	
2.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			178.303.500	144.819.025	81.22	
		1	Penyediaan Makanan	82.960.000	67.193.825	81.00	

		2	Penyediaan Sandang	58.820.000	49.838.250	83.31	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	17.640.000	17.570.950	99.61	
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1.557.800	500.000	32.10	
		5	Pelayanan dukungan psikososial	16.325.700	9.716.000	59.51	

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2024

Pada pencapaian untuk jenis pelayanan dasar :

a. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar Panti
b. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti
c. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

terletak pada satu kegiatan yang sama, dan dengan subkegiatan yang sama.

4. Dukungan Personil

Dalam pencapaian penerapan SPM Bidang urusan Sosial di Kabupaten Agam, dibantu oleh tenaga personil, antara lain :

Tabel 2.19
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)		Total
		PNS	Non PNS	
1	Penyuluh Sosial	1		1
2	Pekerja Sosial	5		11
3	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	1		1
4	Analis Rehabilitasi Sosial Masalah Sosial	1		1
5	Penyuluh Sosial Ahli Pratama	1		1
6	Pendamping Ressos		4	4
7	TAGANA		18	18
8	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)		16	16
9	Pendamping Sosial (PKH)		65	65
10	Pendamping Sosial Masyarakat (PSM)		215	215
11	Relawan Sosial		2	2
Total				**325**

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024, mengalami beberapa permasalahan terkait pencapaian jenis pelayanan dasar tersebut, antara lain.

Tabel 2.20
Permasalahan Dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)		Permasalahan	Solusi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya database penyandang disabilitas terlantar yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database penyandang disabilitas terlantar
				2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal penyandang disabilitas terlantar yang menjadi target capaian	Diperlukan database penyandang disabilitas terlantar sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan

		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar	Diperlukan database penyandang disabilitas terlantar sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran
		4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya database anak terlantar yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database anak terlantar
				2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal anak terlantar yang menjadi target capaian	Diperlukan database anak terlantar sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan

		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan jumlah anak terlantar	Diperlukan database anak terlantar sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya database lanjut usia terlantar yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database lanjut usia terlantar
				2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal lanjut usia terlantar yang menjadi target capaian	Diperlukan database lanjut usia terlantar sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan

		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan jumlah lanjut usia terlantar	Diperlukan database lanjut usia terlantar sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya data lanjut gepeng yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database gepeng terlantar
				2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal gepeng yang menjadi target capaian	Diperlukan database gepeng sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan gepeng	Diperlukan database gepeng sebagai data awal yang akan menjadi dasar

						penghitungan anggaran
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2024

F. Bidang Urusan Tratibum Linmas

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah dengan 6 (enam) jenis pelayanan dasar, yaitu :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota
b. Pelayanan Informasi rawan bencana.
c. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
d. Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana.
e. Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target, Realisasi dan Capaian SPM

Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas dilaksanakan melalui Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan target dan realisasi capaian sebagai berikut.

Tabel 2.21
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.		**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota**	**Orang**	**1**	**1**	**100%**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	14	14	100%	
	2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Dokumen	5	5	100%	
	3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	51	51	100	
	4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan	Dokumen	1	1	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
	5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1	0	100	(Mutu ditutup)
	6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	0	100	(Mutu ditutup)
KEBENCANAAN							
2.		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	**100**	**100**	**100%**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	2	2	100%	
	2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	100	100	100%	
	3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	100	100	100%	
	4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi	Unit	1	1	100%	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					
3.		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Orang**	**150**	**150**	**100%**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	435	435	100%	
	2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	50	50	100%	
4.		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	**284**	**284**	**100%**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	4	4	100%	
	2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	654	654	100%	
	3.	Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	100%	
	4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	1	1	100%	
	5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	654	654	100%	
DAMKAR							
5.		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Orang**	**341**	**341**	**100%**	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	123	111	90.24%	
	2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	9	9	100%	
	3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	7	7	100%	
	4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	79	79	100%	
	5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	9	9	100%	
	6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	341	341	100%	

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Tahun 2024

3. Alokasi Anggaran

Anggaran penunjang penerapan SPM bidang Tratibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan BPBD tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.22
Alokasi Anggaran Penerapan SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				**2,956,496,000**	**2,684,908,792**	**90.81**
		1.	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**2.996.562.000**	**2.545.349.633**	**84.94**
			1.	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	47.631.800	47.404.200	99.52
			2.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	395.778.800	392.433.900	99.15
			3.	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	79.500.000	49.790.000	62.63
			4.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	2.290.296.400	1.915.369.533	83.63

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
				Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
			5.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	183.415.000	140.352.000	76.52
		2.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**124.470.000**	**46.612.000**	**37.45**
			1.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.040.000	15.450.000	36.75
			2.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	82.430.000	31.162.000	37.80

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
				Bupati/Wali Kota			
		3.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**0**	**0**	**0**
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				1.052.360.396	644.453.895	**93.47**
		4.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**32.150.000**	**4.475.050**	**13.92**
			1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	32.150.000	4.475.050	13.92
		5.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**354.886.796**	**138.920.733**	**39.15**
			1.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	101.866.708	35.141.843	34.50
			2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	39.766.666	0	0
			3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	144.244.422	99.882.690	69.25

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
				Bencana Kabupaten/Kota			
			4.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	69.009.000	3.896.200	5.65
		6.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**665.323.600**	**501.058.112**	**75.31**
			1.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	100
			2.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	591.053.300	463.858.400	78.48
			3.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	71.270.300	34.199.712	47.99
		7.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		0	0	**0**
3.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**				**2.041.274.600**	**1.607.144.933**	**78.73**
		8.	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,**		**1.743.465.000**	**1.490.919.933**	**85.51**

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
			Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			1.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.421.099.700	1.198.916.933	84.37
			2.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	148.000.000	147.976.000	99.98
			3.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	147.830.300	132.430.000	89.58
			4.	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	26.535.000	11.597.000	43.70

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
		9.	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**15.000.000**	**4.190.000**	**27.93**
			1.	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	15.000.000	4.190.000	27.93
		10.	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**0**	**0**	**0**
		11.	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**128.239.600**	**61.122.600**	**47.66**
			1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	128.239.600	61.122.600	47.66
		12.	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**154.570.000**	**50.912.400**	**32.94**
			1.	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam	154.570.000	50.912.400	32.94

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
				keselamatan manusia			

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Tahun 2024

4. Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan hal yang penting dalam pencapaian indikator SPM. Pada Urusan Bidang Trantibum Linmas, di Kabupaten Agam didukung oleh 2 (dua) OPD yakni Satpol PP & Damkar dan BPBD yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Agam Tahun 2024

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

No	Jenis Tenaga	Jumlah		Total
		PNS	Non PNS	
1.	Polisi Pamong Praja	32	66	98
2.	Petugas Pemadam Kebakaran	41	45	86
3.	PPNS	3		3
Total		**76**	**111**	**187**

Sumber : Data Satpol PP & Damkar 2024

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Tenaga	Jumlah		Total
		PNS	Non PNS	
1.	Pegawai	20	5	25
2.	Satgas PB	7	9	16
3.	Puldalops PB		10	10
Total		**27**	**24**	**51**

Sumber : Data BPBD Kab.Agam Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pemenuhan SPM Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	1	Pengumpulan Data	1	Keterbatasan sarana dan kompetensi aparatur	Pemenuhan sarana pendataan dan peningkatan kompetensi aparatur
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum tersusunnya dokumen standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyusunan peraturan Bupati yang yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan ketenteraman

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
						dan ketertiban umum
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran	Penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana operasional
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan sarana operasional dan adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penambahan sarana dan prasarana operasional dan penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
2	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	1	Pengumpulan Data	1	Keterbatasan sarana dan kompetensi aparatur	Pemenuhan sarana pendataan dan peningkatan kompetensi aparatur
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum tersusunnya dokumen standar pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyusunan peraturan Bupati yang yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan pelayanan penyelamatan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
						dan Evakuasi Korban Kebakaran
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran	Penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana operasional
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah pos pemadam kebakaran belum sesuai dengan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Penambahan pos pemadam kebakaran pada kecamatan dan Nagari sesuai WMK
3	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	1	Pengumpulan Data	1	Sulit menentukan target pelayanan informasi per jenis bencana bagi masyarakat rawan bencana	Meningkatkan kualitas pengumpulan data dan keakuratan data
		2.	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum ada penghitungan kebutuhan terhadap target capaian SPM tersebut	Melaksanakan penghitungan secara komprehensif terkait target dan kebutuhan pemenuhan SPM
		3.	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran Daerah dalam penanggulangan bencana	Pemenuhan deseminasi informasi pelayanan rawan bencana dilaksanakan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
						melalui pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana berupa sharing dana kegiatan dengan pemerintah nagari/desa
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah personil yang belum memadai	Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dalam membantu desiminasi informasi rawan bencana
				2	Kompetensi petugas masih minim	Peningkatan kapasitas petugas melalui bimtek dan diklat teknis
4	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	1	Pengumpulan Data	1	Sulit menentukan target pelayanan informasi per jenis bencana bagi masyarakat rawan bencana	Meningkatkan kualitas pengumpulan data dan keakuratan data
		2.	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum ada penghitungan kebutuhan terhadap target capaian SPM tersebut	Melaksanakan penghitungan secara komprehensif terkait target dan kebutuhan pemenuhan SPM
		3.	Penyusunan rencana dan penganggaran	1	Keterbatasan anggaran Daerah dalam	Pemenuhan deseminasi informasi pelayanan rawan bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
			pemenuhan pelayanan dasar		penanggulangan bencana	dilaksanakan melalui pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana berupa sharing dana kegiatan dengan pemerintah nagari/desa
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah personil yang belum memadai	Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dalam membantu desiminasi informasi rawan bencana
				2	Kompetensi petugas masih minim	Peningkatan kapasitas petugas melalui bimtek dan diklat teknis
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	1	Pengumpulan Data	1	Lambatnya informasi kejadian bencana dari masyarakat	Pemberdayaan KSB terhadap informasi actual kejadian bencana di kecamatan/nagari
		2.	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan belum tepat, disebabkan tidak dapat diprediksi secara pasti kebutuhan penanganan bencana tersebut	Meningkatkan kapasitas tim kaji cepat penanggulangan bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
		3.	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran daerah	Prioritas anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kedaruratan
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah personil yang belum memadai	Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dalam membantu desiminasi informasi rawan bencana
				2	Kompetensi petugas masih minim	Peningkatan kapasitas petugas melalui bimtek dan diklat teknis
				3	cakupan pelayanan kebencanaan terlalu luas	Membentuk UPT BPBD/pos-pos pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kedaruratan dalam peningkatan respon bencana
						Meningkatkan kapasitas Satgas TRC-PB (Tim Respon Cepat) dalam penanganan bencana

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Tahun 2024

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan /Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	**Pendidikan Dasar**	**1**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)**	**90%**				
			1		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar**	**100%**	**100%**	**61,938,574,141**	**58,873,577,168**	
				1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang kelas baru	1 ruang	6 unit	2,777,841,882	2,763,912,317	99.50

				2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	2 unit	50,000,000	49,451,470	98.90
				3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang perpustakaan	5 Ruang	9 unit	981,590,400	980,512,000	99.89
				4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48 unit	5 unit	2,619,624,961	2,599,889,067	99.25
						Jumlah labor yang dibangun					
						Jumlah Mushalla yang dibangun					
						Jumlah Mushalla yang direhab					
						Jumlah Pagar dan Gerbang yang dibangun					
						Jumlah sekolah yang mendapatkan cor halaman dan pemasangan Paving Block					
						Jumlah sekolah yang mendapatkan DAM					
						Jumlah WC yang dibangun					

					Jumlah WC yang direhab					
		5	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang					
		6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan perlengkapan sekolah	13 paket					
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mendapatkan perlengkapan sarana dan prasarana belajar	40,000 Paket					
				Jumlah siswa miskin yang diberi perlengkapan belajar sesuai dengan SPM	-					
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Kisi-Kisi Ujian Sekolah yang tersusun	6 Mata Pelajaran					
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	438 Sekolah					
		9	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti perlombaan bidang sains, seni, Thafidz, dan Bahasa Inggris	500 Orang					

				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Orang				
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1123 Orang		1,351,500,000	1,344,129,000	99.45
				Jumlah guru honor yang menerima transport untuk 400 orang selama 10 bulan @225.000	400 Orang				
				Jumlah guru MDA (Tahfidz) yang menerima uang transportasi	55 Orang				
				Jumlah tata usaha/operator honor yang menerima uang transport untuk SD negeri sebanyak 421 orang selama 10 bulan @ 200.000,-	421 Orang				
				Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan medan tersulit dan terjauh yangmenerima uang transport di 30 sekolah selama	30 Sekolah				

				10 bulan @ 200.000,-					
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bimtek Tenaga Pendidik yang terlaksana	1 Kegiatan		350,999,950	305,151,356	86.94
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3180				
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	438 Sekolah		109,365,000	94,857,310	86.73
			Jumlah sekolah yang dibina oleh dewan pendidikan	438 Sekolah				
			Jumlah sekolah yang disosialisasi dan dimonitoring BOS SD oleh tim BOS Kabupaten	438 Sekolah				
	13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	438 Sekolah		50,480,533,885	47,622,051,962	94.34

	2		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**24,035,549,792**	**22,429,592,413**	
		1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah yang menerima pembanguan ruang kelas baru	20 Unit Ruang		0	0	0
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		4,178,078,386	4,129,422,595	98.84
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana dan Ultilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2 Unit		131,250,000	130,902,794	99.74
		4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket		484,477,260	0	0
		5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah	10 Paket		348,777,650	344,141,250	98.67
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang di sediakan	4800 Paket		5,000,000	2,990,000	59.80
		7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		433,000,000	358,411,850	82.77

				8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Medan Tersulit Yang menerima transportasi	350 Orang		421,700,000	393,064,500	93.21
						Jumlah Pembayaran Tramsport Guru MDW					
						Jumlah Pembayaran Transport Guru Honorer					
				9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru penilaian angka kredit tenaga pendidik	1600 Orang		110,323,260	85,816,097	77.79
						Jumlah guru seleksi dan diklat kepala sekolah					
						Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru pembelajar untuk memenuhi standar kompetensi					
						Jumlah guru yang mengikuti seleksi tendik berprestasi					
						Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas untuk					

						memenuhi standar kompetensi					
						Jumlah pendidik yang mendapatkan pendidikan profesi guru					
						Jumlah peserta pelatihan kepala sekolah TK, SD, SMP					
				10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan dewan pendidikan kabupaten	68 Satuan Pendidikan		350,000,000	303,999,610	86.86
						Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan UKS/LSS SMP					
				11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	67 Satuan Pendidikan		17,572,943,236	16,680,843,717	94.92
2	**Pendidikan Kesetaraan**	**1**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)**					
			1		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			5,833,830,486	4,848,619,927	

		1	Pembangunan Ruang Gedung Kelas Baru/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Warga Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	3 Unit		1,110,368,443	1,097,999,183	98.89
		2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan		3,251,900,000	3,251,900,000	100
		3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket		8,850,000	8,660,000	97.85
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		25,000,000	23,750,308	95.00
		5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1492 Peserta Didik		44,958,799	44,869,840	99.80
		6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		15,004,000	14,974,496	99.80
		7	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa Non Formal/kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa nonformal /kesetaraan yang tersedia	15 Paket		41,149,700	37,591,400	91.35

				8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	14 Satuan pendidikn		1,336,599,544	368,874,700	27.60
3	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**1**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)**					
			1		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**8,680,292,880**	**8,540,213,818**	
				1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		934,513,682	916,236,309	98.04
				2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Ultilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	15 Unit		437,280,958	426,288,859	97.49
						Jumlah Pembangunan DAM TK dan Paving Block, Pengecoran Halaman PAUD					
						Jumlah Pembangunan Pagar TK					
						Jumlah Pembangunan Toilet TK					

				Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas TK					
				Jumlah ruang UKS TK					
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		639,071,000	628,414,468	98.33
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	14 Paket		30,000,000	21,855,700	72.85
		5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	8 Paket		549,228,750	534,358,800	97.29
		6	Pengadaan Perlengkapan Peseta didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mendapatkan Perlengkapan Belajar	4800 Paket		50,000,000	35,128,660	70.26
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	200 Orang		57,999,400	25,752,000	44.40

						Kompetensi dan Kualifikasi					
				8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	356 Satuan Pendidikan		79,999,090	65,280,650	81.60
						Jumlah Kegiatan Apresiasi PAUD yang terlaksana					
						Jumlah Kegiatan Jambore PAUD yang terlaksana					
						Jumlah Kegiatan Sosialisasi Stunting yang terlaksana					
						Jumlah Lomba Gugus PAUD yang terlaksana					
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					
				9	Pengelola Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	357 Satuan Pendidikan		5,902,200,000	5,886,898,372	99.74

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Tahun 2024

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2024, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/ Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**175.805.000**	**161.502.200**	**91.86**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase pelatihan ANC dan AMP program pelayanan ibu hamil	100%				

2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**45.825.000**	**26.533.000**	**57.90**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah penyedian rumah tunggu persalinan, akomodasi dan konsumsi serta kontribusi pelayanan kesehatan ibu hami dan bersalin,; persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%				
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**200.000**	**200.000**	**100**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan	Persentase terlaksananya	100%				

					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	evaluasi program anak					
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan Balita	100%				
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**769.634.800**	**721.550.000**	**93.75**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	927,505,000	846,533,400	91.27
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**11.900.000**	**11.900.000**	**100**

	pada Usia Produktif				**upaya kesehatan masyarakat**						
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%			
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**14.000.000**	**14.000.000**	**100**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**			

			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%				
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**128.363.000**	**128.348.600**	**99.98**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Peningkatan pelaksanaan program pelayanan penderita diabetes mellitus	100%				
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**			
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				

				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatn orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%			
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**487.941.000**	**163.500.000**	**33.51**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				
				1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%				
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	**1**			**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas**	**7 Unit Utama**	**7 Unit Utama**	**21.951.000**	**13.500.000**	**61.50**
			1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	100%				

				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS	100%				

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2024

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat. Keberadaan infrastruktur fisik yang baik dapat diposisikan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. SPM bidang urusan Pekerjaan Umum lebih mengarah kepada infrastruktur yang bersifat kepentingan hidup masyarakat sehari-hari, yakni terkait persoalan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah. Adapun program/kegiatan/subkegiatan mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Tabel 3.3
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengelohan Air Limbah Domestik	125 RT	94.50%	1.430.000.000	1.351.142.726	94.49
			1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten Kota						
				1	Pembangunan /Penyediaan Sistem PengelolaPeningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaanan Air Limbah Terpusat Skala Kota		125 RT	100.00%	1.280.000.000	1.217.646.896	95.13

				2	Rehabilitasi/Peningkatan Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		12 Bulan	89.00 %	150.000.000	133.495.830	89.00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	71 RT	100%	730.000.000	693.190.351	94.96
			1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota						
				1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		71 RT	100.00%	730.000.000	693.190.351	94.96

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2024

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana**	1			Program Pengembangan Perumahan				134.853.800	28.816.450	21.37
			1		Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena Program Kabupaten/Kota						
				1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	2500 Unit	9600 Unit	85.905.000	5.902.500	6.87
			2		Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana						

				1	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	48.948.800	22.913.950	46.81
2.	**Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah**	1.			Program Pengembangan Perumahan	Tidak menganggarkan kegiatan					

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2024

E. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial**	1				Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.					
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial					
				1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial"	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani	61 Orang	61 Orang	156,205,000	140,000,005	89.63

				2	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	16,870,000	14,920,000	88.44
				3	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	28,309,900	17,758,000	60.7

				4	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	55,423,500	1,714,000	3.09
				5	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanaanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,600,000	892,000	24.78

				6	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	758,200	-	-
				7	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
				8	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS	33,923,100	29,800,000	87.85

								lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	72,800,000	68,646,400	94.29
				10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi	803,900	-	-

								kebutuhan dasarnya			
				11	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,476,200	2,912,000	83.77
				12	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi	1,004,300	350,000	34.85

								kebutuhan dasarnya			
				13	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,814,800	753,000	41.49
				14	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi	56,705,000	38,872,190	68.55

								kebutuhan dasarnya			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial**	1			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial					
			1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani					
				1	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	16,870,000	14,920,000	88.44

				2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	28,309,900	17,758,000	62.73
				3	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	55,423,500	1,714,000	3.09
				4	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar	Persentase Anak terlantar, Lansia	3,600,000	892,000	24.78

						Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
				6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi	33,923,100	29,800,000	87.85

								kebutuhan dasarnya			
				7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	72,800,000	68,646,400	94.29
				8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang	803,900	-	-

								terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,476,200	2,912,000	83.77
				10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi	1,004,300	350,000	34.85

								kebutuhan dasarnya			
				11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,814,800	753,000	41.49
				12	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	56,705,000	38,872,190	68.55

3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut UsiaTerlantar diluar Panti Sosial**	1			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial					
			1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani					
				1	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	16,870,000	14,920,000	88.44

				2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	28,309,900	17,758,000	62.73
				3	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	55,423,500	1,714,000	3.09
				4	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar	Persentase Anak terlantar, Lansia	3,600,000	892,000	24.78

						Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				5	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	758,200		
				6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					

						Kewenangan Kabupaten/Kota					
				7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	33,923,100	29,800,000	87.85
				8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	72,800,000	68,646,400	94.33

				9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	803,900		
				10	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,476,200	2,912,000	83.77
				11	Pemberian Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Terlanksanan anya rehabilitasi	Persentase Anak terlantar,	1,004,300	350,000	34.85

					Penelusuran Keluarga	Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,814,800	753,000	41.49
				13	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar,	56,705,000	38,872,190	68.55

							g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial					
			1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani					
				1	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar,	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan	16,870,000	14,920,000	88.44

							dan lanjut usia terlantar	Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	28,309,900	17,758,000	62.73
				3	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta	55,423,500	1,714,000	3.09

								PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				4	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,600,000	892,000	24.78
				5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
				6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar	Persentase Anak terlantar, Lansia	33,923,100	29,800,000	87.85

						Kewenangan Kabupaten/Kota	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	72,800,000	68,646,400	94.29
				8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas	803,900		-

					Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,476,200	2,912,000	83.77
				10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang	1,004,300	350,000	34.85

							terlantar, dan lanjut usia terlantar	dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,814,800	753,000	41.49
				12	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksanan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di	56,705,000	38,872,190	68.55

							usia terlantar	Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana	1			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial**			-	-	
			1		Kegiatan Program Penanganan Bencana Kabupaten Kota						
				1	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasitasinya kebutuhan dasar korban bencanan alam dan bencanan sosial	82,960,000	67,193,825	89.63
				2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan	Terpenuhinya Orang yang	Terfasilitasitasinya kebutuhan	59,820,000	49,838,250	83.31

						Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	dasar korban bencanan alam dan bencanan sosial			
				3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasitasinya kebutuhan dasar korban bencanan alam dan bencanan sosial	17,640,000	17,570,950	98.94
				4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	Terfasilitasitasinya kebutuhan dasar korban bencanan alam dan	1,557,800	500,000	32.10

							bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota	bencanan sosial			
				5	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Terfasilitasitasinya kebutuhan dasar korban bencanan alam dan bencanan sosial	16,325,700	9,716,000	59.51

Sumber : Data Dinas Sosial Kab.Agam Tahun 2024

F. Bidang Urusan Trantibum linmas

Program dan kegiatan penunjang pemenuhan SPM Bidang urusan Tratibumlinmas tertuang dalam RKPD Kab.Agam Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/ Sub kegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	1			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**3,121,032,000**	**2,591,961,633**	**83%**
			1		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**2,996,562,000**	**2,545,349,633**	**85%**
				1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	12 Dokumen	12 Dokumen	47,631,800	47,404,200	99.80%

						Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					
				2	Pemberdayan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPemberdayan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	395,778,800	392,433,900	99%
				3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	475 Laporan	594 Laporan	2,290,236,400	1,915,369,533	84%
				4	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman	150 Laporan	79 Laporan	183,415,000	140,352,000	77%

					Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan					
				5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	4 Unit	79,500,000	49,790,000	63%
			2		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**124,470,000**	**46,612,000**	**37%**
				1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	100 Laporan	15 Laporan	82,430,000	31,162,000	38%

						Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					
				2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Laporan	22 Laporan	42,040,000	15,450,000	37%
2	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**1**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**2,041,274,600**	**1,607,219,933**	**79%**
			1		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**	**Persentase Laporan kebakaran yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100%**	**1,743,465,000**	**1,490,994,933**	**86%**

					dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1,421,099,700	1,198,916,933	84%
				2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakan dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	12 Dokumen	148,000,000	147,976,000	99.80%
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat	12 Unit	12 Unit	147,830,300	132,505,000	90%

						Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					
				4	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	26,535,000	11,597,000	44%
			2		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase pemeriksaan bangunan yang dipersyaratkan memiki sisten proteksi kebakaran**	**100 %**	**0**	**15,000,000**	**4,190,000**	**28 %**

				1	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	4.190.000	28%
			3		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan**	**49 Persen**	**47 Persen**	**128,239,600**	**61,122,600**	**48%**
				1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	560 Orang	160 Orang	128,239,600	61.122.600	48%

			4		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Laporan kejadian mengancam manusia yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**154,570,000**	**50,912,400**	**33%**
3	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**1**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Terintegrasinya fase pra bencan**	**87 %**				
			1.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana					
				1.	Sosialisasi KIE	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100 Orang	100 Orang	32,150,000	4,475,050	14%

						sesuai jenis bencana					
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana**	**1**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Terintegrasinya fase pra bencana**	**87 %**				
			1		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
				1	Gladi kesiapsiagaan	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi	100 Orang	-	101,866,708	35,141,843	34%

				2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/ kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun masyarakat	1 Unit	-	39,766,666	-	
				3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	100 Orang	146,244,422	99,882,690	68%
				4	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Terpeliharanya alat pendeteksi early warning system	100%	-	69,009,000	3,896,200	6 %

5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Terintegrasinya fase tanggap darurat bencana**	**100 %**				
			1		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
				1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	100%	100%	591,053,300	463,858,400	78%
				2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	71,270,300	34,199,712	48%

				3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana	100%	100%	3,000,000	3,000,000	100%

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Kab.Agam Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diterima oleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penerapan SPM melalui penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Penerapan SPM di tingkat kabupaten wajib dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SPM serta menjadi acuan untuk penerapan SPM pada tahun berikutnya. Untuk maksud tersebut, kami sampaikan Laporan Penerapan & Pencapaian SPM Kabupaten Agam Tahun 2024 ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 27 Februari 2025

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM

SPM 2024

Standar Pelayanan Minimal